

ABSTRAK

“IMPLEMENTASI ASAS *IN DUBIO PRO REO* OLEH HAKIM DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA”

Kevin Ardhya Wibisono (01659220008)

(xi + 121 halaman)

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki landasan aturan untuk mengendalikan perilaku manusia, dengan asas hukum memainkan peran strategis dalam kehidupan masyarakat dan negara. Pemerintah, sebagai penegak hukum, memiliki tanggung jawab untuk memastikan penegakan hukum demi mencapai tujuan hukum yang mengutamakan keadilan, kepatutan, dan kepastian hukum. Asas *in dubio pro reo* menjadi kunci dalam proses peradilan pidana, di mana hakim harus memiliki keyakinan berdasarkan setidaknya dua bukti yang sah. Namun, implementasi prinsip ini tidak selalu berjalan lancar, seperti pada beberapa kasus, termasuk Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST juncto Putusan No. 69 PK/Pid/2018. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip *in dubio pro reo* dalam melindungi hak terdakwa, terutama dalam penanganan kasus Putusan Nomor: 113/Pid.Sus-B/2020 PN Msb dan Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST juncto Putusan No. 69 PK/Pid/2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keputusan hakim memiliki dampak besar terhadap hak terdakwa. Asas *in dubio pro reo* menjadi penting untuk melindungi hak terdakwa dari dakwaan yang keliru. Berbeda dengan Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST juncto Putusan No. 69 PK/Pid/2018 dalam evaluasi kasus Putusan Nomor: 113/Pid.Sus-B/2020 PN Msb menunjukkan kehati-hatian hakim dalam membuat keputusan, mengakui keterbatasan bukti langsung, dan menciptakan keraguan yang melindungi hak terdakwa.

Referensi :41 (1983-2023)

Kata kunci : Proses peradilan pidana; Penegakan hukum; *Asas In dubio pro reo*.

ABTRACT

“IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF IN DUBIO PRO REO BY JUDGES IN HANDLING CRIMINAL CASES”

Kevin Ardhya Wibisono (01659220008)

(xi + 121 page)

As a legal state, Indonesia's rules aims to control human behavior, with the legal principle playing a strategic role in societal and national life. The government, as law enforcers, has the responsibility to ensure law enforcement, prioritizing justice, expediency, and legal certainty. The principle of in dubio pro reo is crucial in the criminal justice process, requiring judges to have confidence based on at least two valid pieces of evidence. However, the implementation of this principle doesn't always run smoothly, as seen in cases like Decision No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST juncto Decision No. 69 PK/Pid/2018. This study aims to analyze the implementation of the in dubio pro reo principle in protecting the defendant's rights, especially in handling cases like Decision number: 113/Pid.Sus-B/2020 PN Msb and Decision No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST juncto Decision No. 69 PK/Pid/2018. The research, normative legal in nature, concludes that the judge's decision significantly impacts the defendant's rights. The in dubio pro reo principle becomes crucial to protect the defendant's rights from wrongful accusations. Unlike Decision No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST juncto Decision No. 69 PK/Pid/2018, the case evaluation of Decision number: 113/Pid.Sus-B/2020 PN Msb shows the judge's caution in decision-making, acknowledging the limitations of direct evidence, and creating doubts that protect the defendant's rights.

Reference : 41 (1983-2023)

Keyword : Criminal justice process; Law enforcement; principle In dubio pro reo